

LAPORAN PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI
TAHUN 2020

Selamat Datang
di
Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
di Lingkungan
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas bimbingan-Nya, penyusunan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2020 menjabarkan hasil pelaksanaan rencana aksi dan kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah berusaha melaksanakan seluruh rencana kerja pembangunan Zona Integritas dan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan Inspektorat atas hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada segenap jajaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dan seluruh pihak yang telah membantu dalam menyukseskan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada tahun 2019.

Cisarua, Juni 2020

Ketua Tim

Pembangunan Zona Integritas

Nanang Subekti



DAFTAR ISI

SAMPUL.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR GAMBAR	4
DAFTAR TABEL.....	5
BAB I PENDAHULUAN	6
A. LATAR BELAKANG	6
B. MAKSUD DAN TUJUAN	7
C. DASAR HUKUM	7
BAB II HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS	8
A. HASIL PELAKSANAAN	8
I. KOMPONEN PENGUNGKIT	8
1. Manajamen Perubahan	8
2. Penataan Tata Laksana.....	13
3. Penataan Sistem Manajemen SDM.....	17
4. Penguatan Akuntabilitas	23
5. Penguatan Pengawasan.....	26
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	30
II. KOMPONEN HASIL	33
B. KENDALA	37
BAB III PENUTUP	39
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Rapat Pembahasan Tim Kerja dan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas	9
Gambar 2	Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas kepada Mancadaya	10
Gambar 3	Pernyataan Komitmen Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	11
Gambar 4	Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan ZI	12
Gambar 5	Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mengikuti Diklat Motivasi di Batu-Malang, Jawa Timur	13
Gambar 6	SOP pada Aplikasi SOPAN	14
Gambar 7	Registrasi Peserta menggunakan Aplikasi e-Pusdik	15
Gambar 8	Menu Informasi Publik di Microsite pusdik.mkri.id	16
Gambar 9	Absensi Online melalui dashboard apps.mkri.id	23
Gambar 10	Plt. Kapusdik memimpin rapat persiapan kegiatan HWKN bagi Ikatan Arsitek Indonesia	24
Gambar 11	Sosialisasi Penguatan Pengawasan kepada Pegawai dan Mancadaya menggunakan Platform Zoom Meeting	27
Gambar 12	Pohon Saran sebagai Media Pengaduan Masyarakat.....	28
Gambar 13	Whistle-Blowing System di Website MK	29
Gambar 14	Maklumat Pelayanan Publik Mahkamah Konstitusi	31
Gambar 15	Informasi Pelayanan Publik Kegiatan Kompetisi Debat Konstitusi melalui Website.....	32
Gambar 16	Penggunaan Tablet Pada Saat Registrasi Peserta	32
Gambar 17	Laporan Kegiatan Pusdik yang Didalamnya Berisi Hasil Survei Kepuasan Peserta Dipublikasikan pada Microsite	33

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Ringkasan Hasil Survei Pengukuran Kinerja	34
Tabel 2	Realisasi Tingkat Kepuasan Layanan Penyelenggaraan Kegiatan Tahun 2019	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan agar tumbuh menjadi birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, birokrasi yang efektif dan efisien serta mempunyai pelayanan publik yang berkualitas, dalam rangka mewujudkan cita-cita *zero tolerance approach* dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dalam rangka mengakselerasi pembaharuan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi telah menetapkan langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan menetapkan unit kerja untuk diusulkan. Penetapan unit kerja sebagai WBK/WBBM tersebut dimaksudkan sebagai kompetisi dan menjadi area percontohan penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja-unit kerja di lingkungan Mahkamah Konstitusi melalui pembangunan Zona Integritas dengan menerapkan instrumen Zona Integritas berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yang meliputi 6 komponen pengungkit yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Sebagai salah satu unit kerja yang diusulkan sebagai area percontohan sebagaimana nota dinas dari Inspektorat nomor 25/2900/PW.01/01/2020 tanggal 15 Januari 2020 perihal Penyampaian unit kerja Calon WBK dalam Pembangunan Zona Integritas, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah melaksanakan Pembangunan Zona Integritas

sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan sebagai salah satu langkah utama membangun unit kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hasil pelaksanaan pembangunan Zona Integritas diharapkan menjadikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi bersih dan bebas KKN serta kualitas pelayanan publik yang lebih baik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Laporan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas ini dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
2. Tujuan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas ini adalah memberikan keseragaman pemahaman dan informasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 102 Tahun 2020 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2020.

BAB II

HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

A. HASIL PELAKSANAAN

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilaksanakan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan. Proses pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dilakukan secara masif pada masing-masing area perubahan. Pelaksanaan rencana kerja dilakukan secara paralel oleh penanggung jawab area perubahan berdasarkan tim kerja pembangunan Zona Integritas. Berikut hasil pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

I. KOMPONEN PENGUNGKIT

1. Manajemen Perubahan

Manajemen Perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (*mind set*), serta budaya kerja (*culture set*) individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas. Target yang ingin dicapai melalui program Manajemen Perubahan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi; dan
- c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari Tim Pembangunan Zona Integritas, didapatkan hasil pelaksanaan sebagai berikut:

a. Penyusunan Tim Kerja

Tim kerja kerja telah disusun dan diformalkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 102 Tahun 2020 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2020. Tim kerja disusun berdasarkan mekanisme yang jelas dan dibahas dalam rapat pembentukan tim yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2020.

Gambar 1

Rapat Pembahasan Tim Kerja dan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas



b. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas

Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas telah disusun dan ditetapkan pada bulan Maret 2020 berdasarkan hasil rapat

pada tanggal 20 Februari 2020. Walaupun pada perkembangannya, beberapa rencana kegiatan diubah dan disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Pembangunan Zona Integritas maupun dokumen rencana kerja dimaksud juga telah disosialisasikan kepada berbagai stakeholder, diantaranya:

- 1) Sosialisasi/pengarahan kepada pegawai Pusdik;
- 2) Sosialisasi/pengarahan kepada mancadaya Pusdik;
- 3) Sosialisasi Pembangunan ZI kepada peserta pendidikan;
- 4) Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan baik melalui microsite dan digital signage.

Gambar 2

Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas kepada Mancadaya



Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan pembangunan ZI, Plt. Kapusdik telah melakukan penandatanganan Surat Pernyataan Komitmen Pembangunan Zona Integritas.

Gambar 3

Pernyataan Komitmen Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

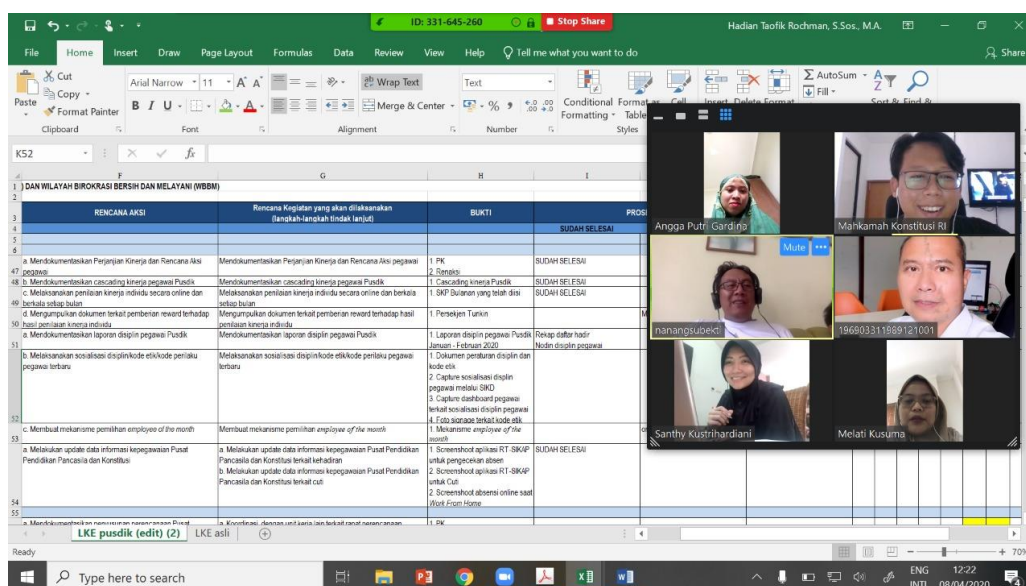


c. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM

Tim Pembangunan ZI telah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap bulan sejak penetapan rencana kerja yaitu bulan April, Mei, dan Juni. Berdasarkan hasil monitorin dan evaluasi bulanan tersebut, tim kerja telah menindaklanjuti dan menyusun laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas.

Gambar 4

Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan ZI



d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyampaikan usulan penetapan Role Model Pusdik kepada pimpinan dan saat ini menunggu review dari Inspektorat dan Biro SDMO Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menerapkan nilai-nilai budaya kerja atau nilai-nilai organisasi, salah satunya dengan mengikuti diklat motivasi yang diselenggarakan oleh Biro SDMO pada tanggal 4 s.d. 8 Desember 2019 di Batu-Malang, Jawa Timur. Selain itu, pegawai Pusdik juga telah menerapkan nilai-nilai budaya kerja seperti budaya disiplin dengan bukti rekapitulasi data kehadiran pegawai Pusdik, budaya integritas dengan bukti penandatanganan pakta integritas pegawai.

Pemilihan agen perubahan di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah dilakukan dan diformalkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 105 Tahun 2020 tentang Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Kepaniteraan dan

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2020 serta Surat Tugas Nomor 16/2600/04/2020 perihal agen perubahan mancadaya Pusdik.

Proses pembangunan ZI di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melibatkan seluruh pegawai yang telah ditetapkan melalui Keputusan Sekjen. Dalam tim pembangunan tersebut seluruh pegawai Pusdik ikut andil mulai dari Pimpinan hingga staf pelaksana.

Gambar 5

Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mengikuti Diklat Motivasi di Batu-Malang, Jawa Timur



2. Penataan Tata Laksana

Penataan Tata Laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada ZI menuju WBK/WBBM. Target yang ingin dicapai pada area Penataan Tata Laksana adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

- b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
- c. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari Tim Pembangunan Zona Integritas, didapatkan hasil pelaksanaan sebagai berikut:

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Dalam pelaksanaan tupoksi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama ini, terutama yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan telah menerapkan Standar Operasional Prosedur yang ada. SOP Pusdik mengacu pada proses bisnis Mahkamah Konstitusi. Hal ini dibuktikan dengan telah dilakukannya review SOP Pusdik terhadap Peta Proses Bisnis MK mengacu pada Nota dinas Nomor 186//DK.01/04/2020 tanggal 9 April 2020 perihal Laporan Hasil Review Standar Operasional Prosedur di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi serta Permohonan Tindak Lanjut. Berdasarkan hasil review tersebut, Sekretaris Jenderal juga telah menetapkan SOP yang telah dilakukan perbaikan. SOP Pusdik juga saat ini telah diinput dalam aplikasi SOPAN (Standar Operasional Prosedur Elektronik) yang berbasis online.

Gambar 6
SOP pada Aplikasi SOPAN

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		Keterangan
		Sekretaris Jenderal	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Bidang Program dan Penyelenggara	Subbidang Program dan Penyelenggara	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran	Penyusunan Kurikulum, Modul dan Bahan Ajar	Kelengkapan	Waktu (11220 Menit)	
1	Menugaskan Kasubid untuk mempersiapkan konsep kurikulum							Agenda kerja	60	Disposisi Kabid
2	Memberikan tugas dan arahan kepada Staf untuk mengumpulkan data dan bahan terkait kurikulum serta menyusun draf kurikulum							Disposisi Kabid	120	Disposisi Kasubid
3	Mengumpulkan data dan bahan terkait kurikulum serta menyusun draf kurikulum lalu menyerahkan draf kurikulum kepada Kasubid							Disposisi kasubid, Data dan bahan kurikulum	2100	Draf kurikulum
4	Mengkaji draf kurikulum dan memberikan usulan jadwal, peserta dan narasumber rapat pembahasan kurikulum kepada Kabid							Draf kurikulum	420	Draf kurikulum yang telah dikaji, Usulan jadwal, peserta dan narasumber rapat
5	Menelaah dan menganalisis draf kurikulum serta menetapkan jadwal, peserta dan narasumber rapat pembahasan kurikulum lalu menyerahkan kepada Kapusdik							Draf kurikulum yang telah dikaji, Usulan jadwal, peserta dan narasumber rapat	240	Draf kurikulum yang telah ditelaah dan dianalisis, Jadwal, peserta dan narasumber rapat
6	Memeriksa draf kurikulum dan melaporkan rencana rapat pembahasan kurikulum kepada Sejen							Draf kurikulum yang telah ditelaah dan dianalisis, Jadwal, peserta dan narasumber rapat	120	Draf kurikulum yang telah diperiksa, Nota dinas

b. E- Office

Mahkamah Konstitusi telah lama menerapkan *e-office* pada berbagai layanan dan operasional manajemen SDM. Berikut diantaranya penggunaan *e-office* oleh pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

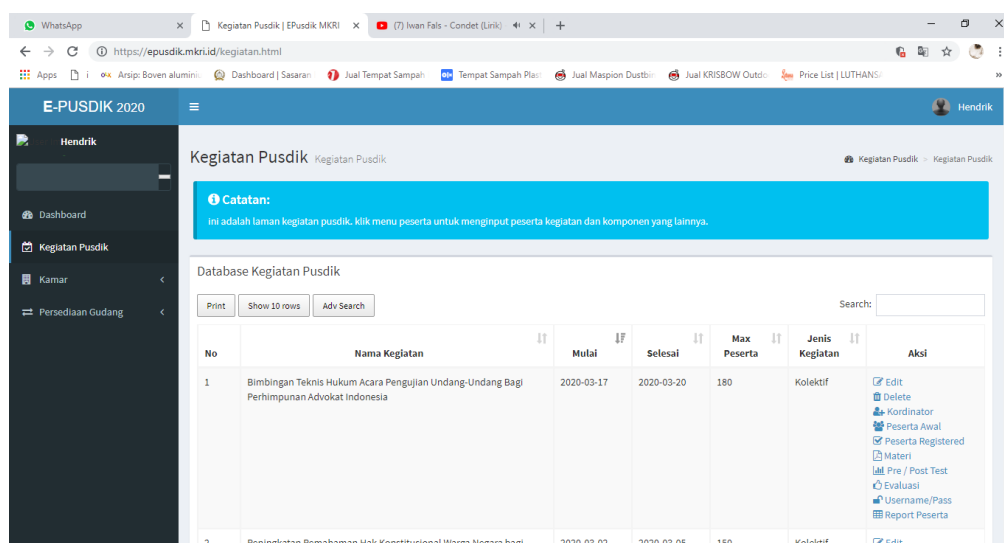
- 1) Pengukuran kinerja pegawai melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada dashboard apps.mkri.id;
- 2) Penilaian kinerja dengan aplikasi e-kinerja pada lakip.mkri.go.id;
- 3) Informasi saldo cuti dan kehadiran pegawai di rtsikap.mkri.go.id;

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dalam menyelenggarakan pendidikan telah menerapkan penggunaan sistem informasi dalam melayani peserta seperti:

- 1) Penerapan aplikasi epusdik.mkri.id untuk memudahkan pengelolaan administrasi pendidikan seperti registrasi, pembagian kamar, absensi, pretest-postest, kuesioner, bahan ajar, dan database peserta;
- 2) Penggunaan videotron di aula Grha Konstitusi 3 untuk menampilkan informasi acara dan materi narasumber;
- 3) Penggunaan Barcode sebagai absensi digital.

Gambar 7

Registrasi Peserta menggunakan Aplikasi e-Pusdik



The screenshot displays the E-PUSDIK 2020 web application interface. The main content area shows a 'Database Kegiatan Pusdik' table with the following data:

No	Nama Kegiatan	Mulai	Selesai	Max Peserta	Jenis Kegiatan	Aksi
1	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia	2020-03-17	2020-03-20	180	Kolektif	Edit Delete Kordinator Peserta Awal Peserta Registered Materi Pre / Post Test Evaluasi Username/Pass Report Peserta
2	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi	2020-03-02	2020-03-05	150	Kolektif	Edit

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah melakukan inovasi dalam pengembangan aplikasi manajemen SDM yaitu pengisian kinerja harian dan catatan absensi harian pegawai Pusdik menggunakan Google Form di bit.ly/KinerjaAprilMei2020 dan bit.ly/KehadiranKinerjaMinggu1Juni2020. Tim kerja juga telah melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan teknologi dalam bentuk Laporan monitoring dan evaluasi penggunaan teknologi dalam pengukuran kinerja, operasionalisasi SDM, dan pemberian pelayanan publik.

c. Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Persekjen MK No 3 tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik telah dilakukan melalui microsite pusdik.mkri.id. Informasi publik yang telah dipublikasikan diantaranya Lakip Pusdik 2017-2019, Laporan Kegiatan Pusdik dengan total 41 laporan, Laporan Penyerapan Anggaran Pusdik, dan Dokumen Rencana Strategis MK 2020-2024.

Tim kerja juga telah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan disusun dalam bentuk Laporan Kunjungan Microsite Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2019.

Gambar 8

Menu Informasi Publik di Microsite pusdik.mkri.id



3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Penataan Sistem Manajemen SDM bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas SDM. Target yang ingin dicapai melalui program penataan sistem manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- c. Meningkatnya disiplin SDM di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi; dan
- e. Meningkatnya profesionalisme SDM di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari Tim Pembangunan Zona Integritas, didapatkan hasil pelaksanaan sebagai berikut:

a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi

Penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai telah dilakukan dengan mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja masing-masing jabatan yang dibuktikan dengan Dokumen Analisis Jabatan, Dokumen Analisis Beban Kerja, dan Dokumen Peta Jabatan yang berpedoman pada Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 3.1 Tahun 2019 perihal Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi melalui Biro SDMO telah menggunakan hasil rekrutmen murni dalam penempatan pegawai yang mengacu pada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan. Hal ini dibuktikan dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- 1) Rincian Usulan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Konstitusi Tahun 2017;
- 2) Surat Dinas Nomor 177/OT.00/08/2017 tanggal 3 Agustus 2017 perihal Permohonan Kebutuhan Pegawai/Bezeting Mahkamah Konstitusi Tahun 2017;
- 3) Surat Keputusan Menpan RB Nomor 95 Tahun 2017 perihal Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2017;
- 4) Pengumuman Nomor 15/KP.01.00/9/2017 perihal Pelaksanaan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2017;
- 5) Pengumuman Nomor 16/KP.01.00/9/2017 perihal Hasil Seleksi Administrasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2017
- 6) Pengumuman Nomor 21/KP.01.00/11/2017 perihal Hasil Seleksi Kompetensi Dasar dan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2017;
- 7) Jadwal Tes Seleksi Kompetensi Bidang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2017;
- 8) Pengumuman Nomor 2697/KP.01.00/11/2017 perihal Kelulusan Hasil Akhir Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2017.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi yang dibuktikan dengan Nota dinas nomor 111/2600/DK.00/04/2020 tanggal 9 April

2020 perihal Usulan Penyesuaian Nomenklatur Jabatan Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

b. Pola Mutasi Internal

Mahkamah Konstitusi telah melakukan pengembangan karier pegawai melalui mutasi internal baik dalam unit kerja maupun antar unit kerja tak terkecuali Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Salah satu bukti telah dilakukan mutasi internal yaitu dokumen Surat Keputusan Sekjen Nomor 229 Tahun 2019 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi dalam melakukan mutasi internal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah memperhatikan kompetensi jabatan yang didukung dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- 1) Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- 2) Data update mutasi pegawai Pusdik Tahun 2020;
- 3) Pemetaan Kompetensi Jabatan pegawai Pusdik;
- 4) Daftar Riwayat Hidup Pegawai Mancadaya Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- 5) Dokumentasi unit kerja telah memberikan pertimbangan terkait proses mutasi.

Untuk melakukan perbaikan kinerja, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah melakukan monitoring dan evaluasi mutasi pegawai Pusdik. Hasilnya monitoring dan evaluasi tersebut dituangkan dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi Mutasi Pegawai Pusdik.

c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyampaikan *self assessment* untuk pengembangan kompetensi pegawai dengan

Nota dinas nomor 6/2610/DK.00/04/2020 tanggal 9 April 2020 perihal Penyampaian Formulir Training Need Analysis kepada Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Selanjutnya Pusdik menyampaikan usulan rencana pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan Training Need Analysis dan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai. Pusdik juga telah melakukan perhitungan kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi masing-masing jabatan.

Dalam pengembangan kompetensi, pegawai Pusdik telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya yang dibuktikan dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- 1) Nota dinas nomor 383/2200/KP.02.00/07/2019 tanggal 3 Juli 2019 perihal Pengumuman Pembukaan Pendaftaran Program Recharging dan Internship TA 2019;
- 2) Pengumuman Nomor 8/KP.02.00/02/2020 tanggal 11 Februari 2020 perihal Program Rintisan Gelar S2 Stuned Bagi Pegawai di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2020;
- 3) Nota dinas nomor 491/2200/KP.02.00/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018 perihal telaah izin belajar Saudara Chafid Sugianto;
- 4) Nota dinas nomor 31/2200/KP.02.00/01/2019 tanggal 18 Januari 2019 perihal telaah terkait pengajuan izin belajar Saudara Bangkit Panji Anarogo;
- 5) Nota Dinas nomor 613/2200/KP.02.00/10/2019 tanggal 9 Oktober 2019 perihal Penawaran Diklat Teknis;
- 6) Nota Dinas nomor 18/2200/KP.02.00/01/2020 tanggal 8 Januari 2020 perihal Penawaran Diklat Teknis TA 2020.

Pusdik juga telah melakukan upaya pengembangan kompetensi pegawai dengan memberikan kesempatan kepada pegawai mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi yang dibuktikan dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- 1) Surat Undangan Nomor 222/KP.02.00/1/2019 tanggal 8 Februari 2019 perihal Undangan Pelaksanaan Workshop Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- 2) Surat Undangan Nomor 672/KP.06.01/03/2020 tanggal 13 Maret 2020 perihal Sosialisasi Taspen;
- 3) Surat Undangan Nomor 1246/KP.00/04/2019 tanggal 2-3 Mei 2019 perihal Pra Workshop Gugus Tugas Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2019;
- 4) Surat Undangan Nomor 1270/KP.02.00/05/2019 tanggal 6-20 Mei 2019 perihal Workshop Gugus Tugas Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2019;
- 5) Surat Undangan Nomor 2371/PW.01/11/2019 tanggal 13-14 November 2019 perihal Undangan sosialisasi membangun budaya anti korupsi dan gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Konstitusi;
- 6) Pengumuman dan Capture Whatsapp pelaksanaan Friday English Day di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Pusdik juga telah melakukan monitoring dan evaluasi hasil pengembangan kompetensi pegawai dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja secara berkala dalam bentuk laporan bulanan.

d. Penetapan Kinerja Individu

Seluruh pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi setiap tahunnya melakukan penetapan kinerja individu dalam bentuk Perjanjian Kerja dan Rencana Aksi. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya dengan melakukan Cascading Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik melalui aplikasi dashboard apps.mkri.id dan pengisian e-kinerja. Hasil

penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward yang dibuktikan dengan:

- 1) Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bobot Sasaran Kinerja Pegawai Dan Kehadiran Pegawai Dalam Rangka Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- 2) Kebijakan Disiplin Pegawai di lingkungan MK;
- 3) Kebijakan pemberian reward bagi pegawai berprestasi dalam bentuk pemilihan Pegawai Teladan.

e. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

Mahkamah Konstitusi telah menerapkan penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai yang dibuktikan dengan:

- 1) Nota dinas nomor 172/2200/KP.02.04/03/2020 tanggal 5 Maret 2020 perihal Evaluasi Kehadiran Pegawai;
- 2) Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 004/PER/SET.MK/2007 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi;
- 3) Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- 4) Screenshot sosialisasi peraturan disiplin melalui dashboard pegawai apps.mkri.id;
- 5) Screenshot sosialisasi peraturan disiplin melalui sikd.mkri.id Melakukan koordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) terkait laporan disiplin pegawai Pusdik;

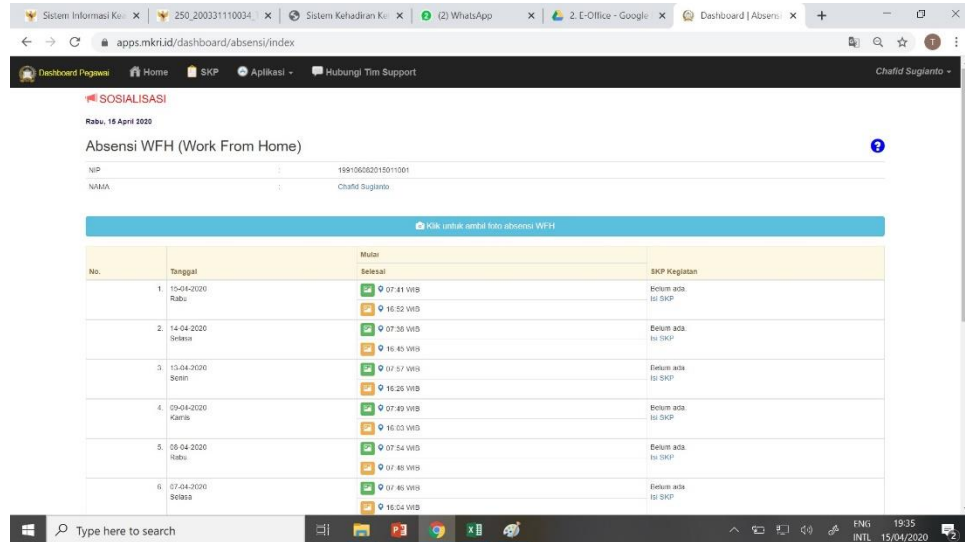
f. Sistem Informasi Kepegawaian

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah melakukan pemutakhiran data informasi pegawai pada sistem informasi kepegawaian yang dibuktikan dengan screenshot data informasi pegawai yang telah update.

Selama masa pandemi covid-19, Mahkamah Konstitusi juga mengembangkan absensi online pegawai yang berkerja dari kantor maupun bekerja dari rumah.

Gambar 9

Absensi Online melalui dashboard apps.mkri.id



4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada unit kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Target yang ingin dicapai melalui Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi; dan
- b. Meningkatnya akuntabilitas Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari Tim Pembangunan Zona Integritas, didapatkan hasil pelaksanaan sebagai berikut:

a. Keterlibatan Pimpinan

Pimpinan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah terlibat dalam penyusunan perencanaan, penetapan kinerja, dan pemantauan pencapaian kinerja pegawai Pusdik. Hal ini dibuktikan dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- 1) Nota dinas nomor 9/2600/DK.00/01/2020 tanggal 14 Januari 2020 perihal Penyampaian Laporan Rencana Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan;
- 2) Nota dinas nomor 26/2600/DK.00/01/2020 tanggal 29 Januari 2020 Penyampaian Hasil Rapat Koordinasi dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), Forum Komunikasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PPKn Provinsi Jawa Barat, dan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI);
- 3) Foto Rapat Persiapan Peningkatan Hak Konstitusional Warga Negara bagi IAI, Forum Komunikasi MGMP PPKn Provinsi Jawa Barat, dan Peradi;
- 4) Foto Rapat Persiapan Debat Konstitusi Tahun 2020;
- 5) Nota dinas nomor 284/2600/DK.06.00/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 perihal Penyampaian Rencana Kalender Kegiatan Pusdik Tahun 2019;
- 6) Dokumentasi penyusunan cascading kinerja dan penyusunan kalender kegiatan.

Gambar 10

Plt. Kapusdik memimpin rapat persiapan kegiatan HWKN bagi Ikatan Arsitek Indonesia



b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun dokumen perencanaan yang dibuktikan dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- 1) Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Pusdik 2018 s.d. 2020;
- 2) Rencana Penyerapan dan Rencana Aksi Anggaran 2019 s.d. 2020;
- 3) Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi 2015 s.d. 2019 dan 2020 s.d. 2024;
- 4) Cascading Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- 5) Kalender Pusdik 2018 s.d. 2020;
- 6) TOR dan RAB 2020 s.d. 2021.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah ditetapkan dan diformalkan melalui SK Sekjen Nomor 81.7 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2015 s.d. 2019.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Pusdik dituangkan dalam LAKIP Pusdik 2017 s.d. 2019 dan telah dievaluasi dan dilaporkan melalui Nota dinas nomor 61/2900/PW.01/02/2020 tanggal 4 Februari 2020 perihal Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi TA 2018.

Salah satu pegawai Pusdik telah mengikuti program internship dalam upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja sehingga pengelolaan akuntabilitas kinerja Pusdik telah dilaksanakan oleh SDM yang kompeten. Hal ini dibuktikan dengan:

- 1) Sertifikat Kelulusan Internship an. Ardiansyah Salim
- 2) Assesment Internship an. Ardiansyah Salim;

Selain Program internship, SDM yang menangani akuntabilitas kinerja mengikuti beberapa kegiatan lainnya, diantaranya:

- 1) Kegiatan Konsinyering Pembahasan Perjanjian Kinerja, Cascading Kinerja, Laporan Kinerja (LAKIP), Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja serta Dialog Kinerja;
- 2) Kegiatan Diskusi dan Sosialisasi Online Kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Disko SAKIP) yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN & RB.

5. Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan ditujukan agar penyelenggaraan unit kerja bersih dan bebas KKN. Target yang ingin dicapai melalui program Penguatan Pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;
- b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari Tim Pembangunan Zona Integritas, didapatkan hasil pelaksanaan sebagai berikut:

a. Pengendalian Gratifikasi

Pusdik telah melaksanakan *public campaign* pengendalian gratifikasi, diantaranya:

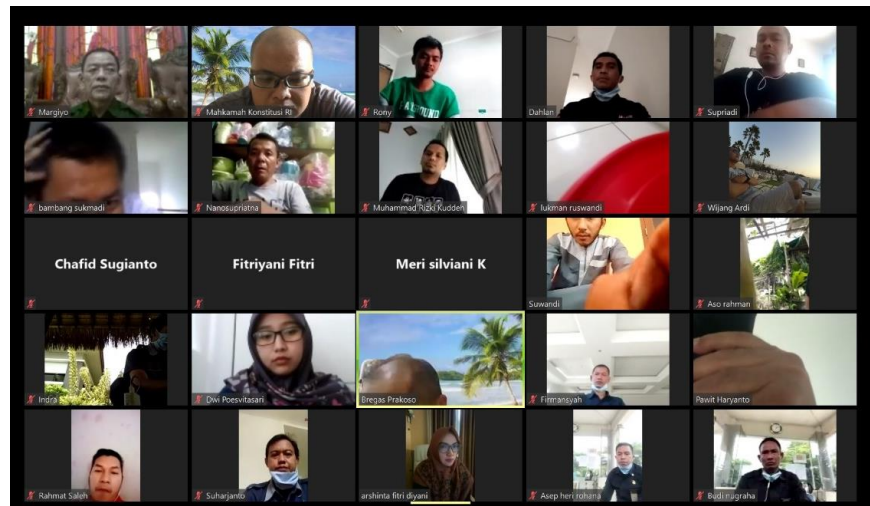
- 1) Banner Unit Pengendalian Gratifikasi;
- 2) *Public campaign* pengendalian gratifikasi melalui microsite;
- 3) Pimpinan melakukan *public campaign* pengendalian gratifikasi pada saat penjelasan teknis kegiatan;
- 4) Menyenggarakan sosialisasi pada Area Penguatan Pengawasan Zona Integritas di Lingkungan Pusat Pendidikan Pendidikan dan Konstitusi;
- 5) Pegawai Pusdik mengikuti sosialisasi membangun budaya anti korupsi dan gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Konstitusi.

Upaya pengendalian gratifikasi di Pusdik telah dilaksanakan diantaranya:

- 1) Penetapan Tim Pelaksana UPG di Mahkamah Konstitusi melalui SK Sekjen Nomor 26.10 Tahun 2018 tentang Tim Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- 2) Penyampaian usulan SK Tim UPG Pusdik;
- 3) Pemasangan kamera pengawas (CCTV) pada lokasi pelayanan, pengawasan dan pemantauan di area pelayanan;

Gambar 11

Sosialisasi Penguatan Pengawasan kepada Pegawai dan Mancadaya menggunakan Platform Zoom Meeting



b. Penerapan SPIP

Mahkamah Konstitusi telah menetapkan satgas penyelenggaraan SPIP melalui SK Sekjen Nomor 37.2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Pusdik telah melakukan upaya pengendalian seperti usulan SK Role Model, penandatanganan Pakta Integritas pegawai, penyampaian LHKPN pegawai, melakukan sosialisasi penguatan pengawasan, sosialisasi peraturan disiplin pegawai, dan sosialisasi kode etik pegawai. Pusdik juga telah melakukan penilaian resiko yang dituangkan dalam bentuk

Dokumen Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Resiko Pusdik.

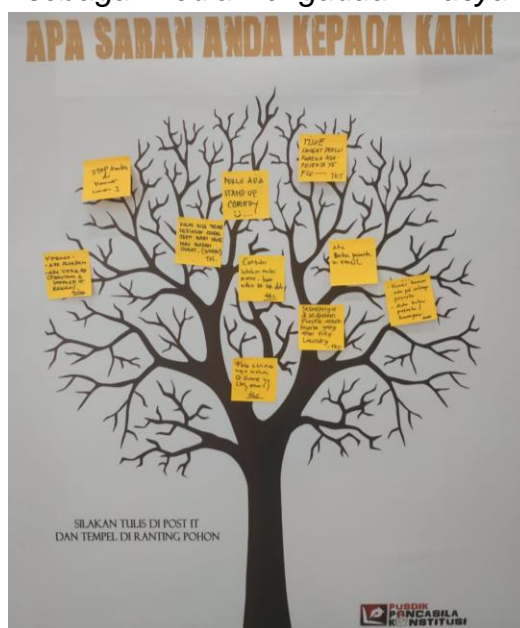
c. Pengaduan Masyarakat

Banyak hal yang telah dilakukan dalam upaya layanan pengaduan masyarakat, diantaranya:

- 1) Penetapan tim pengelola LAPOR dan SP4N melalui SK Sekjen Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tim Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- 2) Pohon Kritik dan Saran Pusdik;
- 3) Informasi Pengaduan melalui E-Kios dan PPT Penjelasan Teknis;
- 4) Kuisisioner Kegiatan;
- 5) Penetapan tim penanganan pengaduan pelanggaran melalui SK Sekjen Nomor 35.8 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- 6) Informasi Nomor Kontak Pengaduan di Buku Pedoman Kegiatan;
- 7) Melakukan rapat pembahasan evaluasi bersama narasumber.

Gambar 12

Pohon Saran sebagai Media Pengaduan Masyarakat(Peserta)



Pengaduan masyarakat yang diterima Pusdik telah ditindaklanjuti yang disampaikan dalam Laporan Kegiatan Pusdik terkait penanganan pengaduan yang telah ditindaklanjuti dan Laporan Tindak Lanjut Evaluasi penanganan Pengaduan Masyarakat. Pusdik juga telah berupaya melakukan monitoring dan evaluasi atas pengaduan masyarakat dengan menyampaikan nota dinas nomor 115/2600/PW.01/04/2020 tanggal 15 April 2020 perihal Permintaan Data Pengaduan Masyarakat Tahun 2019.

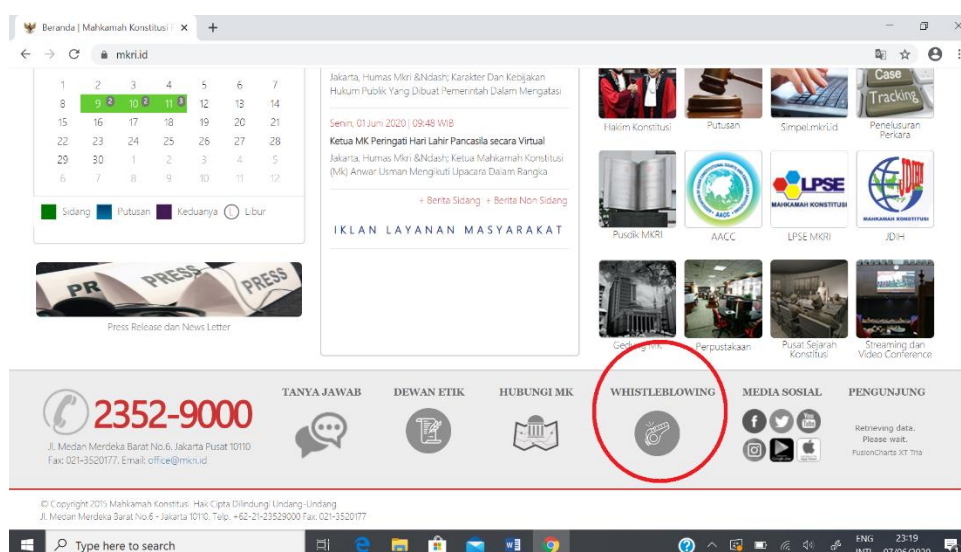
d. *Whistle-Blowing System*

Pusdik telah melaksanakan sosialisasi *whistle-blowing system* Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 April 2020 bersamaan dengan sosialisasi program penguatan pengawasan lainnya. *Whistle-blowing system* Mahkamah Konstitusi dapat diakses pada website mkri.id yang dikelola oleh Inspektorat.

Sebagai bentuk evaluasi, Mahkamah Konstitusi melalui Inspektorat telah menyusun Laporan Bulanan Pelaksanaan *whistle-blowing system* yang di dalam laporan tersebut berisi laporan WBS yang berkaitan dengan Pusdik.

Gambar 13

Whistle-Blowing System di Website MK



e. Penanganan Benturan Kepentingan

Mahkamah Konstitusi telah melakukan identifikasi benturan kepentingan yang ditetapkan melalui Persekjen MK Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Pusdik juga telah menyampaikan nota dinas nomor 125/2600/PW.01/04/2020 tanggal 22 April 2020 perihal Permintaan Telaah Identifikasi Benturan Kepentingan Pusdik.

Pusdik telah menyelenggarakan sosialisasi penanganan benturan kepentingan pada tanggal 14 April 2020 bersamaan dengan sosialisasi program penguatan pengawasan lainnya. Pusdik juga telah melakukan evaluasi terhadap Laporan Penanganan Benturan Kepentingan serta menyusun Laporan Penanganan Benturan Kepentingan Periode Desember 2019 sebagai bentuk tindaklanjut hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan.

6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Target yang ingin dicapai melalui program penguatan kualitas pelayanan publik adalah sebagai berikut:

- a.** Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- b.** Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari Tim Pembangunan Zona Integritas, didapatkan hasil pelaksanaan sebagai berikut:

a. Standar Pelayanan

Pusdik telah menyusun dan melakukan review terhadap standar pelayanan publik dan SOP. Maklumat Pelayanan Publik telah disosialisasikan melalui website resmi Mahkamah Konstitusi dan microsite pusdik.mkri.id. Pusdik juga telah melakukan pendokumentasian SOP sesuai dengan standar pelayanan.

Gambar 14

Maklumat Pelayanan Publik Mahkamah Konstitusi



b. Budaya Pelayanan Prima

Pusdik telah melakukan upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima seperti menyampaikan usulan pelaksanaan Pelatihan Budaya Pelayanan Prima dan mengikuti dan mengikuti kegiatan Diklat Teknis Penyelenggara Pendidikan tanggal 11 s.d. 14 Januari 2017.

Informasi tentang pelayanan di Pusdik telah disampaikan melalui berbagai media seperti website, microsite, sosial media, e-kios, dan media cetak.

Gambar 15
Informasi Pelayanan Publik Kegiatan Kompetisi Debat Konstitusi melalui Website



Pusdik telah menyediakan layanan terpadu/terintegrasi khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan berupa aplikasi e-pusdik. Sebagai bentuk inovasi pelayanan, Pusdik berupaya melakukan pengembangan seperti pengembangan e-pusdik berbasis mobile, penyempurnaan fitur registrasi peserta, pengembangan absensi digital dengan barcode, serta pengadaan AC, e-kiosk, laptop, tablet, dan multimedia aula Grha 3.

Gambar 16
Penggunaan Tablet Pada Saat Registrasi Peserta

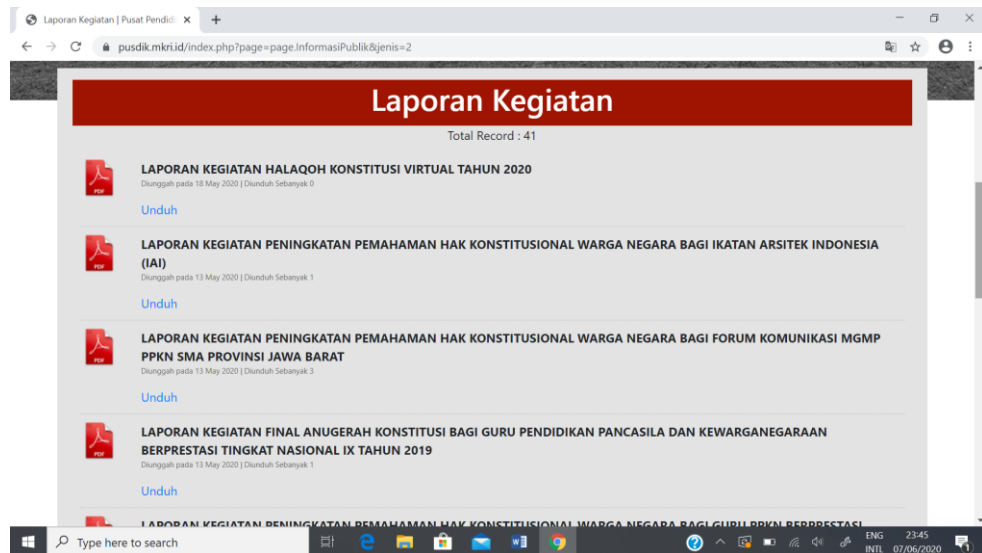


c. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan

Pusdik telah melaksanakan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dibuktikan dengan dokumen Laporan Survei Kepuasan Masyarakat, Laporan Kegiatan yang didalamnya terdapat hasil evaluasi kuesioner peserta, dan LAKIP Pusdik 2017 s.d. 2019. Hasil survei kepuasan masyarakat telah dipublikasikan pada microsite pusdik. Hasil survei tersebut telah ditindaklanjuti dengan berbagai upaya dalam peningkatan pelayanan publik.

Gambar 17

Laporan Kegiatan Pusdik yang Didalamnya Berisi Hasil Survei Kepuasan Peserta Dipublikasikan pada Microsite



II. KOMPONEN HASIL

Dalam pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan WBBM, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada dua sasaran utama yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari Tim Pembangunan Zona Integritas, didapatkan hasil pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

a. Nilai Persepsi Korupsi

Berdasarkan hasil pengukuran Survei Pengukuran Kinerja pada Layanan Indeks Persepsi Korupsi Periode Tahun 2019, didapatkan ringkasan sebagai berikut:

Tabel 1

Ringkasan Hasil Survei Pengukuran Kinerja

No	Kesimpulan	Keterangan
1	Nilai IKM	3,64
2	Nilai IKM Konversi	91,003
3	Kategori	Sangat Baik
4	Unsur Tertinggi	U2: Pencegahan MK terhadap penyalahgunaan jabatan dalam pelayanan
5	Unsur Terendah	U4: Pencegahan MK terhadap praktek KKN dalam pelayanan
6	Prioritas Perbaikan	U5: Pencegahan MK terhadap ketidaktranspan informasi pelayanan

Berdasarkan tabel Ringkasan Hasil Survei Pengukuran Kinerja, hasil penyusunan Survei Pengukuran Kinerja untuk layanan di Layanan Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2019 mempunyai kategori sangat baik, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IKM adalah 3,640 atau konversi IKM sebesar 91,003.

b. Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah melakukan berbagai upaya dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Berdasarkan laporan Inspektorat dalam nota dinas 160/2900/PW.02.01/03/2020 perihal Penyampaian Data LAKIP TA

2019 Terkait Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Temuan Pemeriksaan dan nota dinas nomor 124/2900/PW.02.00/03/2019 perihal Penyampaian Data LAKIP TA 2018 Terkait Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Temuan Pemeriksaan BPK dan APIP untuk Periode Monitoring Sampai Dengan 31 Desember 2018, persentase tindak lanjut penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebesar 100% yang artinya semua hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti.

2. Kualitas Pelayanan Publik

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik telah diukur melalui survei pengukuran kinerja Mahkamah Konstitusi internal dan eksternal tahun 2019.

Hasil pelaksanaan Survei Pengukuran Kinerja Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2019 menunjukkan bahwa tingkat kepuasan penerima layanan eksternal Mahkamah Konstitusi berada pada kategori Baik dan Sangat Baik. Pada kategori Baik yaitu dengan range nilai rata-rata tertimbang nilai indeks antara 3,06 – 3,53 atau konversi IKM 76,61 – 88,30 dan pada kategori Sangat Baik, yaitu dengan range nilai rata-rata tertimbang nilai indeks antara 3,0644 – 3,532 atau konversi IKM 88,31 – 100,00.

Hasil pelaksanaan Survei Pengukuran Kinerja Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2019 menunjukkan bahwa tingkat kepuasan penerima layanan internal Mahkamah Konstitusi berada pada kategori Baik dan Sangat Baik. Pada kategori Baik yaitu dengan range nilai rata-rata tertimbang nilai indeks antara 3,06 – 3,53 atau konversi IKM 76,61 – 88,30 dan pada kategori Sangat Baik, yaitu dengan range nilai rata-rata tertimbang nilai indeks antara 3,0644 – 3,532 atau konversi IKM 88,31 – 100,00.

Disamping itu, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi secara rutin melaksanakan survei kepada peserta untuk menilai

kualitas layanan penyelenggaraan kegiatan pendidikan Pancasila dan Konstitusi, dengan menggunakan metode pengisian kuesioner. Berikut adalah uraian capaian kinerja yang diukur:

- a. Pengukuran Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Materi dan Bahan Ajar Pendidikan
- b. Pengukuran Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Narasumber Pendidikan
- c. Pengukuran Tingkat Kepuasan Peserta atas Dukungan Sumberdaya Kegiatan Pendidikan

Indeks Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan diperoleh dari hasil rata-rata pengukuran Indeks Kepuasan Materi dan Bahan Ajar Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Indeks Kualitas Narasumber Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, dan Indeks Kepuasan Dukungan Sumberdaya Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Adapun analisis penilaian capaian kinerja dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan terbagi menjadi buruk (skala 1 – 1,7), cukup (1,8 – 2,5), baik (2,6 – 3,3) dan sangat baik (3,4 – 4). Berikut adalah realisasinya:

Tabel 2
Realisasi Tingkat Kepuasan Layanan Penyelenggaraan Kegiatan Tahun 2019

No	Keluaran (Output)	Target (Indeks)	Realisasi (Indeks)
1	Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Materi dan Bahan Ajar Pendidikan	3,25	3,70
2	Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Narasumber Kegiatan Pendidikan	3,25	3,60
3	Tingkat Kepuasan Peserta atas Dukungan Sumberdaya Kegiatan Pendidikan	3,25	3,70
	Rata-Rata Indeks Tingkat Kepuasan Layanan Penyelenggaraan Pendidikan	3,25	3,66

Realisasi sebagaimana yang ditampilkan pada tabel diatas memperlihatkan bahwa Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mencapai bahkan melebihi target awal tahun (indeks 3,25) dimana ketiga indeks tingkat layanan dimaksud berhasil mencapai penilaian “**sangat baik**” yaitu indeks 3,66.

B. KENDALA

Secara umum pelaksanaan rencana kerja pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi berjalan dengan lancar tanpa ada kendala atau hambatan yang berarti meskipun dilaksanakan dalam waktu yang sangat singkat. Pandemi Covid-19 yang mengharuskan seluruh pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mewajibkan bekerja dari rumah (*work from home*) menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program-program kegiatan pembangunan Zona Integritas. Berikut secara ringkas kendala dan solusi yang dilakukan oleh tim kerja dalam melaksanakan pembangunan Zona Integritas:

1. Pemahaman tentang Pembangunan Zona Integritas

Banyak hal di dalam proses pembangunan Zona Integritas Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang kurang dipahami atau memiliki pemahaman yang berbeda. Untuk mengatasi hal tersebut, tim kerja terus melakukan koordinasi dengan biro-biro lain khususnya Inspektorat selaku *leading sector* Pembangunan Zona Integritas di Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai Pembangunan Zona Integritas.

2. Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 yang mengharuskan bekerja dari rumah mengakibatkan perubahan pola kerja. Pegawai yang biasanya fokus menyelesaikan tugas-tugas di kantor kini mengalami distraksi karena bekerja di rumah bersama anggota keluarga dan juga melakukan aktifitas rumah tangga lainnya. Pegawai harus bisa mengatur dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar bisa mengerjakan tugas-tugas dari rumah.

Penggunaan platform meeting online seperti *Zoom Meeting*, *Cludx*, dan *Google Meet* sangat membantu pegawai selama *work from home* untuk melakukan rapat koordinasi terkait Pembangunan Zona Integritas. Selain itu, beberapa dokumen fisik pendukung Pembangunan Zona Integritas berada di kantor mengakibatkan rencana kegiatan mengalami keterlambatan.

BAB III

PENUTUP

Outcome dari upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan secara konkrit di dalam lingkup Zona Integritas adalah terbentuknya WBK/WBBM di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Pengembangan WBK dan WBBM secara bertahap diharapkan akan memberikan kontribusi yang dapat meningkatkan nilai IPK Mahkamah Konstitusi khususnya dan IPK Indonesia umumnya.

Perjalanan masih panjang, butuh komitmen bersama-sama yang berkelanjutan untuk terus mengembangkan dan memberikan inovasi dalam menghilangkan perilaku KKN di Mahkamah Konstitusi khususnya dan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.

Laporan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi merupakan gambaran keseluruhan dari pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi kepada publik tentang berbagai program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dalam menjalankan rencana kerja Pembangunan Zona Integritas. Semoga menjadi acuan dalam pengembangan upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik kedepannya.